BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Tindak pidana terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga tindak pidana akan semakin meresahkan masyarakat.¹

Tindak pidana dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa tindak pidana itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana asusila, namun demikian hampir setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan

---

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> diakses pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 21.15 WIB

bahwa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah tindak pidana yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila.

Tindak pidana seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, khususnya pada kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan, dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya, selama individu masih mempunyai daya tarik seksual dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak pidana pencabulan bahkan pemerkosaan. Tindak pidana asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban. Allah SWT juga melaknat bagi pelaku pencabulan.²

Tindak pidana dan kekerasan seksual beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, baik media cetak maupun elektronik, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, telah berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun usaha tersebut baru

---

² https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_Pidana_seksual diakses pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 21.17 WIB

berhasil mengurangi intensitas dari kualitasnya saja, dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara laki-laki sendiri, pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan memiliki pengetahuan yang dangkal.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkap hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila

perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.³

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak dibawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3) :⁴

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,

(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

(3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 82 ayat (1) menyatakan:

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

---

³Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15-16

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 82 ayat (2) :

- (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Menurut pasal 82 ayat (1) dan Pasal 76E :

“Setiap orang dilakng melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”⁵

Adapun diduga perbuatan asusila yang korbannya adalah anak, dan juga adalah perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya Undang-Undang perlindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat, karena korban anak bisa menjadi trauma, ketakutan dan keluarga korban juga amat merasa malu.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor :112/Pid.Sus/2015/PN.Smg. bahwa kasus pencabulan terhadap anak tersebut terjadi di Kota Semarang. Terdakwa Mucholid Agus dengan sengaja melakukan tipu musliat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya. Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara berjanji untuk menikahi Saksi I. Pada saat saksi I dan terdakwa berada dikamar, saksi II Laksita Desy Sulistyو menanyakan keberadaan saksi I dan diketahui saksi I berada di kostan bersama dengan terdakwa di daerah Salatiga, lalu saksi II memberitahukan kepada saksi III Sugeng Sulistyو, Pada saat itu juga saksi III melaporkan ke Polsek Banyumanik. Pada pemerikaan hasil Visum Saksi I

---

⁵ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

yang juga menjadi korban mengalami luka robek dibagian selaput dara. Karena perbuatannya dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terdakwa dikenakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁶

Pelaku tindak Pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak yaitu peran Kejaksaan yang terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan:

---

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :112/Pid.Sus/2015/PN.Smg.

Pasal 1 ayat (1) :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.”

Pasal 2 ayat (1) :

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

Pasal 8 ayat (2) :

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.”⁷

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak dengan mengambil judul **“PERAN KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

⁷ Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

1. Bagaimana pertimbangan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Semarang?
2. Bagaimana peran Kejaksaan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Semarang
2. Untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Semarang

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Menjadi salah satu panduan dalam menangani tindakan penerapan hukum terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi kaum akdemisi penegak hukum.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam menegakkan keadilan sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.

E. Terminologi

1. Peran

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Dalam penulisan ini peranan kepolisian sebagai penegak hukum.⁸

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁹

3. Penerapan

Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan, menerapkan.¹⁰ Dalam Skripsi yang Penulis buat , membahas mengenai Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak.

4. Sanksi Pidana

Merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.¹¹

5. Tindak pidana

---

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 12 Mei 2019 Pukul 15.43

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html> diakses pada tanggal 12 Mei 2019 Pukul 15.46

Merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.¹²

6. Pencabulan

Perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.¹³

7. Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keturunan yang kedua, Manusia yang masih kecil.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori

---

¹²<https://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur-unsur.html> diakses pada tanggal 12 Mei 2019 Pukul 15.50

¹³<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-pencabulan.html> diakses pada tanggal 12 Mei 2019 Pukul 15.55

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985, hlm. 45

dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan permasalahan yang diteliti, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.¹⁵

Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.¹⁶

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

3. Sumber Data

A. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara menemukan atau menggali data ke lapangan secara langsung dengan cara wawancara dengan narasumber seperti Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

---

¹⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005, *Metodelogi Penelitian*, Cet VI, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 44

¹⁶Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian, Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 63

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 tentang Pencabulan.
  2. Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di ganti dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel,dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:
- Kamus hukum
  - Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Semarang. Untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan menggunakan metode pustaka (library research) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di pilih penyusun dalam melakukan studi kasus yaitu di Kejaksaan Negeri Semarang.

6. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup peran kejaksaan dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak di kejaksaan negeri semarang.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “Peran Kejaksaan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kejaksaan Negeri Semarang” di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pencabulan, tinjauan umum tentang kejaksaan dan Pencabulan dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Bagaimana pertimbangan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Semarang dan Bagaimana peran Kejaksaan dalam pelaku penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.